

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Kesimpulan yang dipaparkan pada bab ini merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian yang dikaji oleh penulis dalam skripsi yang berjudul “Kiprah M. Jusuf dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan Masa Orde Baru 1978- 1983”. Setelah dilakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, M. Jusuf merupakan salah satu tokoh militer yang berasal dari Bone, Sulawesi Tenggara. Sebagai seorang tokoh militer, M. Jusuf mendapat kesempatan untuk berkarir dalam pemerintahan. Selain itu ia merupakan tokoh militer yang mendapat posisi tertinggi ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan tahun 1978- 1983 sekaligus juga merangkap sebagai Panglima ABRI. Pendidikan militer yang didapat dari *Kaigun* dan *Heiho* menjadi modal baginya untuk memiliki sikap menjadi seorang pemimpin. Kemampuan kepemimpinan yang didapatkan dari pendidikan militer menjadi modal bagi M. Jusuf berkarir didunia militer dan pemerintahan, sehingga mengantarkan beliau mendapatkan posisi menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan 1978- 1983.

Kedua, menjadi seorang Menteri Pertahanan dan Keamanan tahun 1978-1983 memiliki tanggung jawab untuk membuat kondisi pertahanan dan keamanan negara stabil. Upaya yang dilakukan oleh M. Jusuf dengan mengeluarkan suatu kebijakan dalam upaya menstabilkan negara yang tergambar dari tigas kasus yaitu pemulihan keamanan di Timor Timur, program ABRI Masuk Desa dan penanganan kelompok Petisi 50. Ketiga kasus ini berkaitan dalam bidang pertahanan dan keamanan yang dijalani oleh M. Jusuf. Kondisi sosial politik keamanan dan pertahanan menjelang M. Jusuf diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan menjadi salah satu faktor M. Jusuf mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan keamanan di Timor Timur, mencetuskan pogram ABRI Masuk Desa dan menangani kelompok Petisi 50.

Ketiga, sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan pada tahun 1978-1983 yang memiliki tanggung jawab menjaga pertahanan dan keamanan negara.

M. Jusuf mengeluarkan kebijakan dengan pertimbangan kondisi yang mengganggu pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Pada tahun 1976 terjadi integrasi Timor Timur kedalam Republik Indonesia. Di daerah ini terdapat partai berhaluan kiri yaitu Fretilin yang memiliki persepsi berbeda dengan partai- partai lain mengenai proses kemerdekaan Timor Portugis. Setelah mayoritas rakyat sepakat untuk berintegrasi dengan wilayah Indonesia, partai Fretilin yang merasa tidak sependapat dengan mayoritas masyarakat Timor Timur dan membuat kerasahan sehingga mengganggu keamanan di sana. Selain meresahkan, Republik Indonesia memiliki trauma terhadap kelompok- kelompok berhaluan kiri sehingga M. Jusuf sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan mengambil inisiatif untuk memulihkan keamanan di Timor Timur karena wilayah ini sudah menjadi bagian ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Kebijakan M. Jusuf selanjutnya dengan mencetuskan program ABRI Masuk Desa. Adanya kerenggangan ABRI dengan rakyat menjadi faktor program ini dicetuskan oleh M. Jusuf. Tugasnya yaitu untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraannya dengan melaksanakan berbagai pembangunan. Dalam sektor lain, program ini dicetuskan untuk melihat kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Hankamrata) langsung dimasyarakat. Karena setiap warga negara wajib memiliki kesadaran bahwa masalah pertahanan dan keamanan bukan hanya tanggung jawab ABRI tetapi tanggung jawab bersama. Ini menjadi bukti jika ABRI Masuk Desa merupakan suatu program yang dibuat untuk memperkuat pertahanan negara.

M. Jusuf pun dihadapkan dengan perkembangan situasi politik yang dinilai mengganggu jalannya pemerintahan Soeharto. Mulai munculnya tokoh- tokoh yang berani mengkritik pemerintahan Soeharto yang menilai pemerintahan tidak sesuai dengan UUD 1945. Sehingga muncul kelompok- kelompok seperti Lembaga Kesadaran Berkonstitusi dan Forum Studi dan Komunikasi TNI- AD. Aktivitas kedua kelompok ini pada awalnya disambut baik, akan tetapi dalam perjalanannya kedua kelompok ini dianggap mampu mengancam jalannya pemerintahan apalagi terjadi dualisme ditubuh Angkatan Darat. Pidato Presiden Soeharto pada Rapim ABRI di Pekanbaru dan pada peringatan Kopasandha di Jakarta menuai kecaman dari tokoh- tokoh yang tergabung kedalam dua lembaga

tersebut. Tokoh- tokoh tersebut tergabung kedalam kelompok Petisi 50. M. Jusuf sebenarnya sependapat dengan tokoh- tokoh yang ingin ABRI berada diatas semua golongan akan tetapi M. Jusuf tidak mampu berbuat banyak. Pencekalan yang arahkan kepada tokoh- tokoh Petisi 50 merupakan jalan lain dari opsi pembuangan ke pulau Buru. Meskipun M. Jusuf tidak mampu berbuat banyak karena masalah politik merupakan bagian kerja Kopkamtib akan tetapi itu masih masuk kedalam Departemen Pertahanan dan Keamanan yang dipegangnya.

Keempat, kebijakan M. Jusuf sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dianggap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas negara. Dampak yang dihasilkan dari kebijakan M. Jusuf mampu menjaga stabilitas negara. Kondisi pertahanan dan keamanan yang sempat terganggu diawal masa kerja saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dapat terkendali karena kebijakannya membawa dampak yang cukup penting. Keberhasilan memulihkan keamanan di Timor Timur memberikan dampak positif karena pembangunan dapat segera direalisasikan disana. Kasus kelompok Petisi 50 yang bermuatan politik berhasil dikurangi pergerakannya meskipun dengan cara yang kurang memuaskan banyak pihak. Program ABRI Masuk Desa sendiri menjadi salah satu program unggulan ABRI dalam membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat dan terus berlangsung hingga berakhirnya masa Orde Baru.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Penelitian skripsi ini dapat menjadi suatu rujukan serta referensi untuk dunia pendidikan pada pembelajaran sejarah pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat kelas 12 kurikulum 2013. Materi yang ada pada penelitian ini dapat menunjang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar tentang “mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru”. Pembahasan ini dapat menunjang pembahasan mengenai Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru pada masa jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan M. Jusuf. Karena sejarah tidak selalu berbicara mengenai perang, maka sejarah mengenai tokoh menjadi salah satu bahan yang menarik untuk dipelajari.

Penelitian ini juga dapat menunjang perkuliahan bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Materi

penelitian skripsi ini dapat menambah referensi bagi para mahasiswa terutama dalam mata kuliah Sejarah Orde baru dan Reformasi. Selain itu penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Sejarah UPI mengenai peranan M. Jusuf dalam perpolitikan Orde Baru 1966-1993. Penelitian ini memberikan pengetahuan tambahan mengenai sosok M. Jusuf yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan 1978- 1983.

Bagi penelitian selanjutnya, karena ketertarikan penulis terhadap program ABRI Masuk Desa dan untuk melengkapi penulisan mengenai bidang pertahanan dan keamanan. Maka penulis merekomendasikan bahan kajian mengenai sepak terjang Jenderal Poniman sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan tahun 1983-1988. Salah satu aspek yang dapat dibahas mengenai kebijakan ABRI Masuk Desa dibawah Jenderal Poniman. Demikian kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi pendidikan di Indonesia dan juga bahan pembelajaran secara umum.